



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6470/2021
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi total berbasis masyarakat sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, telah ditetapkan menjadi strategi nasional pembangunan sanitasi;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, penghargaan terhadap institusi merupakan bagian dari strategi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
- c. bahwa terdapat Kabupaten/Kota yang dinilai berhasil mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat, sehingga perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2021.

KESATU : Daftar Kabupaten/Kota Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kabupaten/Kota Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas kategori:

- a. Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free*);
- b. Kabupaten/Kota Terbaik dalam Upaya Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan Sembarangan (*Open Defecation Free*);
 1. Kategori *Enabling*;
 2. Kategori *Demand*; dan
 3. Kategori *Supply*,
- c. Kabupaten/Kota Terbaik Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan;
- d. Kabupaten/Kota Terbaik Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan Kategori;
 1. Kategori *Enabling*;
 2. Kategori *Demand*; dan
 3. Kategori *Supply*.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6470/2021
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2021

DAFTAR KABUPATEN/KOTA PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2021

A. KABUPATEN/KOTA STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (*OPEN DEFICATION FREE/ODF*)

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kategori
1.	Bali	Kabupaten Badung	Percepatan ODF
2.	Jambi	Kota Jambi	Percepatan ODF
3.	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	Percepatan ODF
4.	Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat	Percepatan ODF
5.	Jawa Barat	Kabupaten Subang	Percepatan ODF
6.	Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen	Percepatan ODF
7.	Jawa Timur	Kabupaten Ponorogo	Percepatan ODF
8.	Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	Percepatan ODF
9.	Jawa Timur	Kabupaten Sampang	Percepatan ODF
10.	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	Percepatan ODF
11.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjarbaru	Percepatan ODF
12.	Lampung	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Percepatan ODF
13.	Lampung	Kabupaten Lampung Barat	Percepatan ODF
14.	NTB	Kota Mataram	Percepatan ODF
15.	NTT	Kabupaten Flores Timur	Percepatan ODF
16.	NTT	Kabupaten Manggarai	Percepatan ODF
17.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa	Percepatan ODF
18.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Timur	Percepatan ODF
19.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bulukumba	Percepatan ODF
20.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	Percepatan ODF

21.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Tana Toraja	Percepatan ODF
22.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Enrekang	Percepatan ODF
23.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Takalar	Percepatan ODF
24.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Jeneponto	Percepatan ODF
25.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Sinjai	Percepatan ODF
26.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Utara	Percepatan ODF
27.	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Percepatan ODF
28.	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	Percepatan ODF
29.	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	Percepatan ODF
30.	Sumatera Selatan	Kabupaten Lubuk Linggau	Percepatan ODF

B. KABUPATEN/KOTA TERBAIK DALAM UPAYA PERCEPATAN STOP BUANG AIR BESAR (*OPEN DEFICATION FREE/ODF*)

1. KATEGORI *ENABLING*

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar Baru
2.	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi
3.	Lampung	Kabupaten Tulang Bawang Barat
4.	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih
5.	Jawa Timur	Kabupaten Ponorogo

2. KATEGORI *DEMAND*

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram
2.	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Flores Timur
3.	Sumatera Barat	Kabupaten Bukit Tinggi
4.	Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen
5.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone

3. KATEGORI *SUPPLY*

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Timur
2.	Jambi	Kota Jambi
3.	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai
4.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Tana Toraja
5.	Jawa Timur	Kabupaten Lumajang

C. KABUPATEN/KOTA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN

No.	Provinsi	Kabupaten/kota	Kategori
1.	Aceh	Kota Banda Aceh	STBM Berkelanjutan
2.	Banten	Kota Tangerang	STBM Berkelanjutan
3.	DIY	Kota Yogyakarta	STBM Berkelanjutan
4.	DIY	Kabupaten Kulonprogo	STBM Berkelanjutan
5.	DIY	Kabupaten Sleman	STBM Berkelanjutan
6.	Jawa Tengah	Kabupaten Boyolali	STBM Berkelanjutan
7.	Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	STBM Berkelanjutan
8.	Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	STBM Berkelanjutan
9.	Jawa Tengah	Kabupaten Kendal	STBM Berkelanjutan
10.	Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	STBM Berkelanjutan
11.	Jawa Timur	Kota Madiun	STBM Berkelanjutan
12.	Jawa Timur	Kota Malang	STBM Berkelanjutan
13.	Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	STBM Berkelanjutan
14.	Jawa Timur	Kota Blitar	STBM Berkelanjutan
15.	Jawa Timur	Kota Batu	STBM Berkelanjutan
16.	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	STBM Berkelanjutan
17.	Jawa Timur	Kabupaten Blitar	STBM Berkelanjutan
18.	Jawa Timur	Kota Mojokerto	STBM Berkelanjutan
19.	Jawa Timur	Kabupaten Gresik	STBM Berkelanjutan
20.	Jawa Timur	Kabupaten Lamongan	STBM Berkelanjutan
21.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tabalong	STBM Berkelanjutan
22.	Lampung	Kabupaten Way Kanan	STBM Berkelanjutan
23.	Lampung	Kota Metro	STBM Berkelanjutan
24.	Lampung	Kabupaten Pringsewu	STBM Berkelanjutan
25.	NTB	Kabupaten Sumbawa Barat	STBM Berkelanjutan
26.	NTT	Kabupaten Alor	STBM Berkelanjutan
27.	NTT	Kota Kupang	STBM Berkelanjutan
28.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Palopo	STBM Berkelanjutan
29.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Sidenreng Rappang	STBM Berkelanjutan

30.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pare-Pare	STBM Berkelanjutan
31.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu	STBM Berkelanjutan
32.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pinrang	STBM Berkelanjutan
33.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Barru	STBM Berkelanjutan
34.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Wajo	STBM Berkelanjutan
35.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bantaeng	STBM Berkelanjutan
36.	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	STBM Berkelanjutan
37.	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	STBM Berkelanjutan
38.	Sumatera Selatan	Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir	STBM Berkelanjutan

D. KABUPATEN/KOTA TERBAIK SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN KATEGORI

1. KATEGORI *ENABLING*

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	DI Yogyakarta	Kabupaten Sleman
2.	Jawa Timur	Kota Mojokerto
3.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Wajo
4.	Jawa Timur	Kota Madiun
5.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pinrang

2. KATEGORI *DEMAND*

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	DI Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo
2.	Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung
3.	Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek
4.	Jawa Timur	Kabupaten Pacitan
5.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Bau Bau

3. KATEGORI *SUPPLY*

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Jawa Timur	Kabupaten Gresik
2.	Lampung	Kota Metro
3.	Jawa Timur	Kota Batu
4.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Barru
5.	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari

E. PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA TERBAIK DALAM PERCEPATAN
100% LIMA PILAR SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
BERKELANJUTAN

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Sumbawa Barat
2.	Aceh	Kota Banda Aceh

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002